



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 207/HUMAS PMK/XI/2020

Pemahaman Rehabilitasi Korban NAPZA Perlu Ditingkatkan

Deli Serdang (5/12) - Permasalahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) merupakan ancaman bagi generasi muda bangsa. Hal itu harus menjadi perhatian serius untuk segera ditangani oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ironisnya, penanganan kasus penyalahgunaan NAPZA melalui upaya rehabilitasi masih mengalami kendala. Salah satunya yaitu stigma bahwasanya rehabilitasi merupakan sebuah aib dan penyiksaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong semua pihak untuk lebih mensosialisasikan upaya rehabilitasi sebagai solusi atas kasus penyalahgunaan NAPZA.

"Permasalahan yang saat ini harus dicari solusi adalah bagaimana menekan angka penyalahgunaan NAPZA dan mendorong masifnya upaya rehabilitasi bagi korban," ujarnya saat Kunjungan Kerja ke Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Deli Serdang, Sabtu (5/12).

Ia kembali menilai bahwa citra rehabilitasi masih kurang dipahami masyarakat luas. Akibat dari itu, hingga kini masih ada kekhawatiran terhadap proses rehabilitasi.

"Penyalahguna NAPZA takut menjalani rehabilitasi karena dipersepsikan sama dengan penyiksaan. Perlu dingat, bahwa rehabilitasi bukanlah aib," tegas Muhadjir.

Salah satu daerah yang diketahui masih memiliki jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA tertinggi ialah Provinsi Sumatera Utara. Prevalensinya tercatat mencapai 2,73 atau jauh melampaui prevalensi nasional 1,8 persen.

Adapun tren jenis zat yang banyak digunakan oleh penyalahguna NAPZA di Sumatera Utara yaitu seputar sabu-sabu, ekstasi dan ganja.

Muhadjir mengungkapkan Pemerintah Sumatera Utara saat ini telah menyediakan 48 fasilitas rehabilitasi, 30 diantaranya merupakan binaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dan 18 lainnya merupakan binaan Kementerian Sosial.

"Sumatera Utara perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlah penduduk di sini merupakan terbanyak keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah," sebut Muhadjir.

Ia pun telah memastikan fasilitas yang tersedia di Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang. Antar lain terdapat layanan berupa ruangan detoksifikasi untuk klien baru yang ditempatkan di sana selama 2 minggu dan ada pula ruang perawatan, serta ruang konseling.

Selain itu, ada juga ruang primary sehingga para klien dapat mengikuti kelas seminar. Para penyampai materi diharapkan dapat turut mendorong semangat para pecandu NAPZA agar dapat selamanya berhenti.

Muhadjir pun sempat berdialog dengan salah satu klien rehabilitasi di tempat tersebut. Terungkap, klien rata-rata berusia 17 hingga 35 tahun yang mendapatkan narkoba dari lingkungan teman terdekat dengan harga sekali pakai di kisaran Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

"Saya doakan mudah-mudahan segera kembali ke kehidupan normal dan tidak mengulangnya lagi. Nanti tolong ceritakan ke kerabat terdekat, betapa tidak enaknyanya hidup sebagai pecandu dan agar menjauhi barang yang merusak itu," pesan Menko PMK.

Di lain sisi, pada kunjungan kerja tersebut, Muhadjir beserta jajaran juga meninjau alat PCR (polymerase chain reaction) demi melayani pasien COVID-19 di RSUD Muhammadiyah dengan ditemani Direktur RS tersebut, Moh. Riza, dan Rektor UMSU Agussani.

"Karena di Sumatera Utara tidak semua rumah sakit tersedia alat swab, maka diarahkan ke RSUD Muhammadiyah. Di sini ada, 96 PCR server dan ruang uji PCR yang hasilnya dapat diketahui dalam 12 jam, serta hasilnya dapat diterima lewat email ataupun Whatsapp," pungkash Muhadjir.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**